

PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN DI PROVINSI PAPUA

TAHUN 2023



Oleh: Ir. Iriawan, MBA., MM

Fungsional Perencana Muda - Bappeda Provinsi Papua
2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, individu diberi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berbudaya. Lebih dari sekadar proses pembelajaran, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membentuk karakter, membangun kemampuan, dan membuka peluang bagi setiap individu untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Pentingnya pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, pendidikan membantu meningkatkan kualitas hidup individu. Dengan pendidikan yang baik, seseorang memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, memiliki penghasilan yang stabil, dan hidup dengan standar kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan juga memberikan akses kepada individu untuk mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan masyarakat dan bangsa.

Selain manfaat bagi individu, pendidikan juga memiliki dampak yang luas bagi pembangunan suatu negara. Negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil dan berkembang. Pendidikan yang baik juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan partisipasi politik, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal penting dalam persaingan global saat ini. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan investasi yang strategis bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Meskipun telah terjadi peningkatan signifikan dalam akses pendidikan, terutama di tingkat dasar dan menengah, masih terdapat masalah dalam hal mutu pendidikan, kesenjangan antarwilayah, dan ketidakmerataan akses pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini diperparah dengan kondisi geografis dan sosioekonomi yang beragam di Indonesia, yang menyebabkan pendidikan di

daerah-daerah tertentu, termasuk Provinsi Papua, mengalami kendala yang cukup kompleks.

Salah satu urgensi masalah pendidikan di Indonesia adalah ketidakmerataan akses pendidikan. Meskipun angka partisipasi sekolah (APS) di tingkat dasar dan menengah terus meningkat, terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antarprovinsi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infrastruktur pendidikan yang masih kurang memadai di daerah terpencil, ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik yang tidak merata, serta faktor ekonomi yang membuat beberapa keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Selain itu, mutu pendidikan juga menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi. Standar pendidikan yang bervariasi antarwilayah dan kurangnya kualifikasi tenaga pendidik di beberapa daerah mengakibatkan disparitas mutu pendidikan antarwilayah yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kesenjangan kemampuan dan kualitas lulusan, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua.

Pendidikan di Provinsi Papua merupakan bagian penting dari pembangunan nasional Indonesia. Namun, Provinsi Papua masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan yang perlu segera diatasi. Kondisi geografis yang sulit, faktor keamanan, kebijakan yang belum optimal, serta tantangan dalam rekrutmen guru adalah beberapa masalah utama yang mempengaruhi pendidikan di Provinsi Papua. Salah satu tantangan utama pendidikan di Provinsi Papua adalah kondisi geografis yang sangat beragam dan menantang. Wilayah Provinsi Papua yang sebagian besar terdiri dari hutan belantara dan pegunungan membuat akses terhadap pendidikan menjadi sulit, terutama bagi masyarakat di pedalaman yang terisolasi. Infrastruktur pendidikan yang masih kurang memadai di wilayah ini menjadi hambatan utama dalam menyediakan akses pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat.

Faktor keamanan juga menjadi masalah serius yang mempengaruhi pendidikan di Provinsi Papua. Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi di Provinsi Papua seringkali mengganggu proses belajar mengajar dan membuat sekolah menjadi tidak aman bagi siswa dan guru. Ketidakstabilan keamanan ini juga berdampak negatif pada minat belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diterima.

Selain itu, kebijakan pendidikan yang belum optimal juga menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Papua. Beberapa kebijakan pendidikan dinilai kurang memperhatikan konteks dan kebutuhan khusus Provinsi Papua, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di daerah tersebut. Faktor lain yang menjadi permasalahan serius di Provinsi Papua adalah kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadi masalah serius. Sulitnya rekrutmen guru dari provinsi lain untuk bekerja di Provinsi Papua, serta minimnya jumlah tenaga pendidik lokal yang memiliki kualifikasi memadai, menyebabkan kekurangan guru yang berkualitas di Provinsi Papua.

Dengan memahami berbagai masalah tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua. Upaya-upaya tersebut harus mencakup perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan keamanan di lingkungan sekolah, reformasi kebijakan pendidikan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di Provinsi Papua. Dengan demikian, diharapkan pendidikan di Provinsi Papua dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan menjadi bagian yang integral dari pembangunan nasional. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka secara khusus akan dibahas mengenai kondisi tersebut melalui Policy Paper dengan judul ***“Pembangunan Bidang Pendidikan di Provinsi Papua”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Provinsi Papua sebagai salah satu provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan dalam menyelenggaraan pendidikan. Hasil sensus yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa Papua menjadi wilayah dengan skor pembangunan manusia paling rendah. Pada 2023, IPM Papua adalah sebesar 62,25, tertinggal 20,54 poin dari IPM Provinsi DKI Jakarta (BPS, 2024). Beberapa masalah utama yang dihadapi Provinsi Papua meliputi:

1. Kondisi Geografis

Wilayah Provinsi Papua yang geografisnya berupa pegunungan dan hutan belantara membuat akses terhadap pendidikan menjadi sulit, terutama bagi masyarakat di pedalaman. Infrastruktur pendidikan yang minim dan sulitnya transportasi menuju daerah-daerah terpencil menjadi hambatan utama dalam menyediakan akses pendidikan yang merata di Provinsi Papua.

2. Faktor Keamanan

Konflik horizontal dan gangguan keamanan yang kerap terjadi di Provinsi Papua juga memengaruhi proses pendidikan. Ketidakstabilan keamanan seringkali menjadi hambatan bagi proses belajar mengajar. Sekolah sering kali menjadi sasaran konflik, menyebabkan siswa dan guru merasa tidak aman dalam melakukan aktivitas belajar.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua, sehingga masyarakat Provinsi Papua dapat menikmati hak-hak pendidikan mereka dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi atas permasalahan pendidikan pada Provinsi Papua di atas, rumusan dari permasalahan yang ada dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Kondisi geografis khususnya ke daerah pedalaman Papua menjadi permasalahan utama dalam peningkatan pendidikan di Papua yang mengakibatkan sulitnya akses transportasi dan pengembangan infrastruktur. Jarak tempuh menjadi lama dan pembiayaan infrastruktur menjadi besar, akibatnya jam belajar menjadi terlambat dan kondisi infrastruktur menjadi apa adanya dengan kondisi yang kurang layak;
2. Kondisi keamanan yang tidak kondusif menyebabkan ketidaknyamanan dalam proses belajar mengajar di Papua, baik bagi tenaga pengajar maupun murid. Gangguan keamanan yang kerap terjadi mengakibatkan murid-murid jarang masuk sekolah dan enggannya tenaga pengajar untuk ditempatkan di daerah-daerah pedalaman dan tidak sedikit pula tenaga pengajar meninggalkan tempat pekerjaan yang berakibat pada terhambatnya proses belajar mengajar.

1.4 Tujuan

Guna menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari pembahasan dalam makalah ini adalah *Mendesripsikan penyebab utama masalah pendidikan di Provinsi Papua, berkaitan dengan faktor-faktor geografis dan keamanan.*

II. PEMBAHASAN DAN ANALISIS MASALAH

2.1 Faktor-faktor Penyebab Masalah Pendidikan di Papua

2.1.1 Kondisi Geografis di Papua

Provinsi Papua memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan, hutan belantara, dan rawa-rawa yang sulit diakses. Hal ini menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di daerah pedalaman yang terisolasi. Infrastruktur pendidikan yang minim dan sulitnya akses transportasi menuju daerah-daerah terpencil membuat sekolah-sekolah di Papua seringkali sulit dijangkau oleh siswa dan guru. Akibatnya, tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Papua cenderung lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Angka partisipasi sekolah di Papua dibandingkan dengan di lain di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi											
	7 - 12			13-15			16-18			19-24		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Aceh	99,67	99,44	99,43	98,42	97,96	97,72	83,28	83,1	83,41	32,61	31,72	33,1
Sumatera Utara	99,32	99,5	99,51	96,99	96,78	96,76	78,66	78,66	79,25	27,05	26,6	28,61
Sumatera Barat	99,61	99,55	99,76	96,63	96,52	96,79	84,07	83,71	84,33	36,41	35,41	38,08
Riau	99,65	99,61	99,65	95,66	95,72	95,89	77,81	77,32	78,15	28,79	28,65	30,07
Jambi	99,66	99,33	99,49	96,39	96,2	96,01	72,5	72,53	72,46	24,14	23,35	23,98
Sumatera Selatan	99,65	99,38	99,41	94,85	95,06	95,27	71,53	70,93	71,71	18,81	18,61	19,79
Bengkulu	99,76	99,49	99,42	97,49	97,73	97,91	79,75	79,31	79,57	30,46	29,42	30,74
Lampung	99,53	99,56	99,61	95,58	95,63	95,93	71,72	71,14	71,74	21,17	20,72	21,66
Kep. Bangka Belitung	99,47	99,41	99,51	93,17	93	93,2	68,15	68,42	69,53	18,02	17,68	17,59
Kep. Riau	99,62	99,28	99,29	98,85	99,01	99,07	84,4	84,54	84,97	19,83	19,5	20,51
Dki Jakarta	99,53	99,44	99,49	98,68	97,95	98,17	72,32	72,1	72,5	24,92	24,89	26,52
Jawa Barat	99,5	99,39	99,4	95,09	95,27	95,75	67,8	68,66	68,58	23,51	23,99	24,72
Jawa Tengah	99,66	99,58	99,57	96,84	96,77	97,08	70,79	70,82	70,87	23,55	23,76	24,59
Di Yogyakarta	99,7	99,59	99,63	99,43	99,01	98,88	89,63	89,95	91,17	51,41	50,43	51,6
Jawa Timur	99,4	99,14	99,28	97,76	97,64	97,64	74,14	73,4	74,07	26,27	26,21	26,53
Banten	99,45	99,33	99,43	96,77	96,39	96,65	68,94	69,22	69,64	21,59	22,14	23,72
Bali	99,7	99,55	99,61	98,22	97,85	97,95	83,96	83,84	84,73	28,95	30,18	30,92
Nusa Tenggara Barat	99,52	99,17	99,46	98,34	97,74	97,95	77,49	77,43	77,46	26,22	25,64	26,42
Nusa Tenggara Timur	98,42	98,59	98,62	95,32	94,83	94,89	75,77	75,55	75,93	30,54	29,36	30,68

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi											
	7 - 12			13-15			16-18			19-24		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kalimantan Barat	98,64	98,73	98,81	93,14	92,64	92,92	69,38	68,72	69,25	24,57	24,5	25,08
Kalimantan Tengah	99,55	99,2	99,13	95,21	94,61	95,21	66,7	66,32	66,32	24,47	24,29	23,27
Kalimantan Selatan	99,38	99,43	99,3	93,5	94,01	94,12	69,31	69,88	69,95	24,7	24,52	27,18
Kalimantan Timur	99,6	99,57	99,64	98,9	98,75	98,71	82,01	81,43	81,5	29,86	29,33	32,33
Kalimantan Utara	98,67	98,98	99,22	96,51	97,03	96,96	76,5	76,5	77,03	25,02	25,62	27,63
Sulawesi Utara	99,37	99,34	99,34	95,41	94,86	95	73,86	74,33	74,55	23,67	23,43	23,57
Sulawesi Tengah	98,5	98,22	98,34	93,32	93,02	93,13	76,32	75,84	76,29	28,22	27,04	27,58
Sulawesi Selatan	99,29	99,43	99,49	93,55	93,2	93,22	71,21	70,81	71	35,08	35,07	34,47
Sulawesi Tenggara	99,16	99,05	99,2	95,06	94,8	95	75,02	74,53	74,6	31,97	31,81	31,73
Gorontalo	99,02	98,93	98,69	92,05	91,83	91,85	71,3	71,68	71,7	31,66	30,06	33,2
Sulawesi Barat	98,19	98,4	98,31	90,12	89,39	89,47	71,22	70,85	71,57	23,8	23,43	23,98
Maluku	99,52	99,55	99,59	97,65	97,69	97,97	79,68	79,03	79,9	39,03	40,15	37,41
Maluku Utara	98,84	99,13	99,12	97	97,59	97,51	77,01	77,7	78,38	31,23	30,67	28,78
Papua Barat	98,08	98,27	98,41	96,85	97,37	97,42	81,21	80,56	80,58	30,92	30,69	31,15
Papua	83,43	84,35	83,61	80,02	81,66	80,91	63,98	65,93	64,15	22,9	23,58	23,89
Indonesia	99,19	99,1	99,16	95,99	95,92	96,1	73,09	73,15	73,42	26,01	25,99	26,85

Sumber: BPS (2023)

Tabel di atas menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut provinsi dan rentang usia (7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, 19-24 tahun) untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Angka tersebut menunjukkan persentase populasi usia tertentu yang bersekolah pada rentang usia tersebut di setiap provinsi dan tahun yang bersangkutan. Dari perbandingan pada tabel tersebut, terlihat bahwa APS di Provinsi Papua cenderung lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional di setiap rentang usia. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan partisipasi sekolah di wilayah tersebut. Rendahnya angka putus sekolah ini menyiratkan bahwa mereka yang telah mampu mengakses pelayanan pendidikan pun masih rentan untuk terlempar dari pendidikan formal.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, Papua adalah salah satu dari Provinsi negara di Indonesia yang berada dan identik dengan daerah keterbelakangan dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi lainnya di Indonesia (Kogoya, *et al.*, 2023). APS di Provinsi Papua memang masih lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar provinsi lain di Indonesia, bahkan tergolong yang paling rendah. Hal ini

menunjukkan adanya tantangan serius dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua yang perlu segera diatasi. Salah satu faktor utama penyebab rendahnya APS di Provinsi Papua adalah kondisi geografis. Provinsi Papua memiliki wilayah yang luas dan geografis yang sulit, sehingga akses terhadap pendidikan menjadi sulit bagi sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedalaman. Faktor keamanan dan konflik juga turut memengaruhi akses pendidikan di Provinsi Papua.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan kualitas tenaga pendidik yang terbatas juga menjadi kendala dalam meningkatkan APS di Provinsi Papua. Kurangnya fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan sarana transportasi, juga turut berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi sekolah di Provinsi Papua. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Peningkatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta program-program yang dapat mendorong partisipasi sekolah di Provinsi Papua perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan APS dan kualitas pendidikan di wilayah Provinsi Papua.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, ada tiga bentuk kesenjangan pendidikan, yaitu kesenjangan struktural, kesenjangan kultural, dan kesenjangan spasial. Kesenjangan spasial adalah kesenjangan yang terjadi karena tempat atau geografi yang berbeda (kemdikbud.co.id, 2019). Terkait pendidikan berbasis luas dan kesenjangan spasial menemui relevansinya ketika berbicara tentang pendidikan di daerah Papua. Sekolah-sekolah di kota-kota besar di Papua mungkin tak memiliki kesulitan yang sama dengan yang dialami sekolah-sekolah di pedalaman. Permasalahannya, masih banyak daerah di Provinsi Papua yang belum memiliki akses transportasi, komunikasi, serta infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan pendidikan.

Kondisi geografis Provinsi Papua yang sulit tersebut berdampak langsung pada akses pendidikan di wilayah tersebut. Sekolah-sekolah di daerah pedalaman seringkali memiliki fasilitas yang terbatas dan kurang dilengkapi, sehingga memengaruhi

kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Selain itu, sulitnya akses transportasi juga membuat guru-guru sulit untuk mencapai sekolah-sekolah di daerah terpencil, yang kemudian berdampak pada ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas di Provinsi Papua.



Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Papua

Berdasarkan peta di atas dapat dilihat bahwa banyak daerah di Provinsi Papua yang berada di pegunungan maupun di dataran tinggi. Dari segi pendidikan, hal ini tentunya menyulitkan akibat kurangnya akses jalan yang memadai, serta minimnya jumlah sekolah yang terdapat pada daerah-daerah pedalaman tersebut. Dengan kata lain, kondisi geografis di Provinsi Papua memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan di wilayah tersebut.

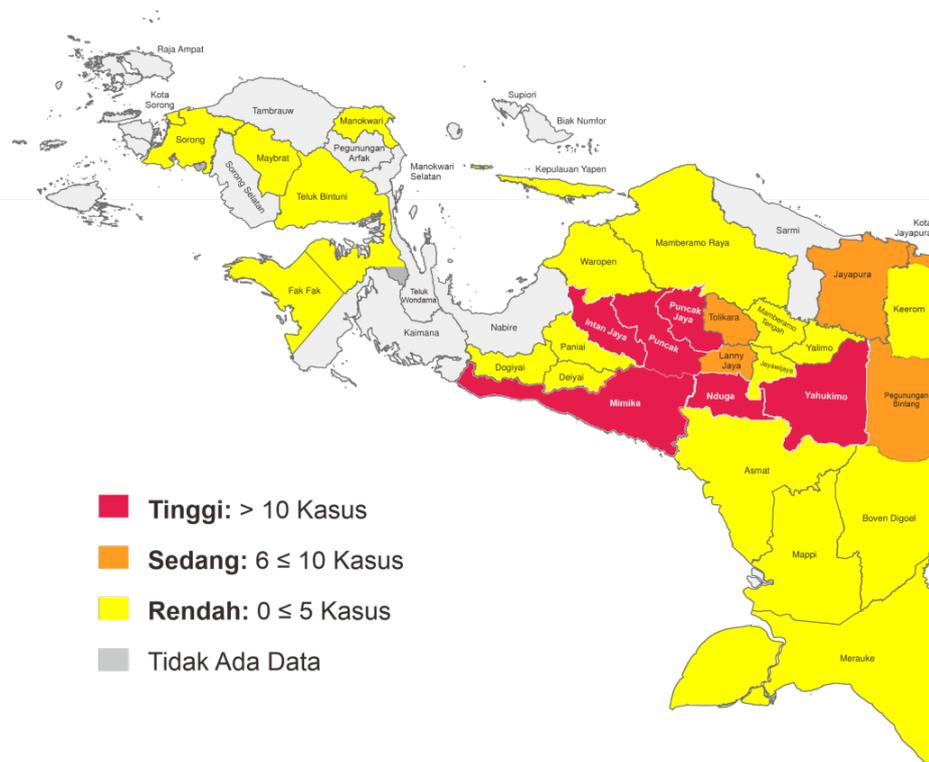
Sulitnya akses terhadap pendidikan menyebabkan banyak anak Papua yang kesulitan untuk mengakses sekolah. Kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai juga berpengaruh pada kualitas pembelajaran di Papua. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali kurang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti buku teks, alat-alat peraga, dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kelulusan dan mutu pendidikan di Papua secara keseluruhan.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai masalah geografis di Papua, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Perbaikan infrastruktur pendidikan, pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi geografis Papua, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik di daerah terpencil menjadi langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

2.1.2 Faktor Keamanan di Provinsi Papua

Konflik vertikal antara pemerintah pusat dan gerakan separatis Papua serta konflik horizontal antar kelompok masyarakat di Provinsi Papua telah lama menjadi masalah kompleks di wilayah ini. Konflik ini memiliki akar sejarah yang dalam, termasuk ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, isu hak asasi manusia, dan aspirasi kemerdekaan Papua. Konflik ini telah menyebabkan dampak yang luas, termasuk terhadap sektor pendidikan di Provinsi Papua.

Konflik vertikal dan horizontal di Papua telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap pendidikan di wilayah tersebut. Salah satunya adalah terganggunya proses pembelajaran akibat ketidakstabilan keamanan di beberapa daerah, yang mengakibatkan siswa dan guru kesulitan untuk mengakses sekolah atau melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan normal. Selain itu, konflik juga dapat mengakibatkan pengungsi internal yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pendidikan. Jumlah konflik dan kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua bisa dijelaskan melalui gambar berikut.



Gambar 2. Sebaran Konflik dan Kekerasan di Provinsi Papua

Konflik yang terjadi di Papua memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kemajuan pendidikan. Eskalasi kekerasan dan konflik yang terus-menerus mengganggu stabilitas sosial dan keamanan, yang pada gilirannya mempengaruhi akses, kualitas, dan kontinuitas pendidikan di Papua. Salah satu dampak utama dari konflik ini adalah terganggunya proses pembelajaran. Sekolah-sekolah di daerah-daerah yang terkena konflik sering kali harus ditutup atau beroperasi secara terbatas, sehingga menyebabkan siswa kehilangan akses ke pendidikan. Selain itu, ketidakstabilan keamanan juga membuat para guru sulit untuk mengajar dengan efektif, karena mereka harus merasa khawatir akan keselamatan mereka sendiri.

Konflik juga berdampak pada ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Sekolah sering kali menjadi sasaran konflik, yang menyebabkan rusaknya infrastruktur pendidikan dan hilangnya fasilitas belajar-mengajar yang penting. Hal ini memengaruhi kualitas pendidikan yang dapat diterima oleh siswa di Papua. Selain itu, konflik juga dapat mengakibatkan pengungsi internal, yang kemudian memerlukan perhatian khusus dalam hal pendidikan. Anak-anak pengungsi sering

kali kehilangan akses ke sekolah dan harus menghadapi ketidakpastian dalam pendidikan mereka. Secara keseluruhan, konflik di Papua memiliki dampak yang merugikan terhadap kemajuan pendidikan di wilayah tersebut. Untuk mengatasi dampak ini, upaya-upaya perdamaian dan rekonsiliasi harus didorong, sambil memastikan bahwa akses, kualitas, dan kontinuitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait.

2.2 Analisis Kondisi Politik, Sosial, dan Ekonomi Papua yang Mempengaruhi Pendidikan

Provinsi Papua dengan segala kekayaan alamnya, merupakan provinsi yang kaya akan potensi. Namun, di balik kekayaannya tersebut, Provinsi Papua juga menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan yang tidak dapat diabaikan. Faktor politik, sosial, dan ekonomi memainkan peran penting dalam membentuk lanskap pendidikan di Papua. Analisis mendalam terhadap kondisi politik, sosial, dan ekonomi menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan mutu dan akses pendidikan di daerah ini.

Sejarah Papua yang penuh dengan konflik politik, terutama terkait dengan isu otonomi khusus dan hak untuk merdeka, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pendidikan di wilayah ini. Konflik politik yang belum terselesaikan menciptakan ketidakstabilan sosial yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Selain itu, keterlibatan pemerintah pusat dalam pengembangan pendidikan di Papua juga menjadi faktor penting yang memengaruhi arah dan kebijakan pendidikan di daerah ini.

Papua memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa yang kaya. Namun, keberagaman ini juga menjadi tantangan dalam menyelenggarakan pendidikan yang merata dan inklusif. Peran masyarakat adat dalam pendidikan turut menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam merancang kebijakan pendidikan yang bersifat lokal dan kontekstual. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan di Papua.



Ketimpangan ekonomi antara Papua dan daerah lain di Indonesia menjadi salah satu masalah utama yang mempengaruhi pendidikan di Papua. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di Papua. Program pemberdayaan ekonomi yang tidak merata juga dapat memperburuk kondisi pendidikan di Papua.

Dari analisis kondisi politik, sosial, dan ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Papua, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor tersebut menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya dalam menyusun strategi yang dapat mengatasi tantangan pendidikan di Papua. Kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Papua memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan di daerah ini. Konflik politik, keberagaman budaya, dan ketimpangan ekonomi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi dalam upaya meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Papua. Diperlukan kerjasama semua pihak dan upaya yang komprehensif untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di Papua.

III. PILIHAN KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan dari Kebijakan Pendidikan di Provinsi Papua

Tujuan dan sasaran memiliki peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan karena tujuan dan sasaran membantu mengarahkan fokus perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Tujuan dan sasaran ini menjadi panduan untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, kebijakan dapat menentukan prioritas dalam pengalokasian sumber daya yang terbatas. Hal ini membantu mengidentifikasi area yang paling penting dan mendesak untuk mendapatkan perhatian lebih.

Tujuan dan sasaran juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan kebijakan. Mereka memberikan standar yang dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan telah mencapai hasil yang diharapkan atau tidak. Dengan demikian, mereka membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja kebijakan secara objektif. Tujuan dan sasaran yang jelas juga meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Mereka membantu menetapkan standar yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah atau organisasi terkait dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran merupakan elemen kunci dalam perumusan kebijakan yang membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Tujuan dan Sasaran dari Kebijakan Pendidikan di Papua diuraikan sebagaimana berikut.

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari kebijakan pendidikan di Provinsi Papua adalah untuk meningkatkan akses, kesetaraan, dan mutu pendidikan di Papua agar setiap anak di Papua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan

berkualitas.

2. Sasaran Kebijakan

Sasaran dari kebijakan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan tingkat partisipasi sekolah (APS) di Papua secara keseluruhan, dengan fokus pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan di Papua, dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, serta memperkuat manajemen sekolah.
- c. Meningkatkan keamanan di lingkungan pendidikan, dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi siswa dan tenaga pendidik.
- d. Meningkatkan kesesuaian kebijakan pendidikan dengan konteks lokal Papua, sehingga kebijakan yang ada dapat lebih efektif dalam mendukung peningkatan mutu dan akses pendidikan.
- e. Meningkatkan jumlah guru yang berkualitas dan berkomitmen di Papua, dengan memberikan insentif dan fasilitas yang menarik bagi guru, serta meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru lokal.

3. Indikator Keberhasilan

- a. Kebijakan yang dirumuskan akan dinilai berdasarkan indikator keberhasilan sebagaimana berikut.
- b. Peningkatan tingkat partisipasi sekolah di Papua, terutama di daerah-daerah terpencil.
- c. Peningkatan rata-rata nilai ujian nasional dan ujian sekolah di Papua.
- d. Menurunnya tingkat kelulusan sekolah dasar yang tidak tepat waktu (KTT) di Papua.
- e. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi di Papua.
- f. Peningkatan tingkat kepuasan siswa, orang tua, dan masyarakat

terhadap sistem pendidikan di Papua.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, dan berkualitas di Papua, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perkembangan anak-anak Papua dan kemajuan pendidikan di wilayah tersebut. Tujuan dan sasaran tersebut dapat disusun menjadi suatu agenda kebijakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. Agenda Formulasi Kebijakan Pendidikan di Papua

No.	Agenda Kebijakan	Penjelasan
1	Peningkatan Akses Pendidikan	Melakukan peningkatan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan jalan menuju daerah terpencil, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Papua.
2	Peningkatan Keamanan Sekolah	Memperkuat keamanan di sekitar sekolah dengan bekerja sama dengan pihak keamanan untuk mengatasi konflik horizontal dan vertikal yang mengganggu proses belajar-mengajar.
3	Revisi Kebijakan Pendidikan	Melakukan evaluasi dan revisi kebijakan pendidikan yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kondisi lokal Papua dan lebih efektif dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan.
4	Peningkatan Jumlah dan Kualitas Guru	Melakukan program peningkatan jumlah dan kualitas guru di Papua dengan meningkatkan pendidikan guru lokal dan menarik guru dari luar Papua dengan insentif yang menarik.
5	Pengembangan Sekolah Asrama	Melakukan pengembangan sekolah asrama untuk memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil dan meningkatkan mutu pendidikan dengan lingkungan belajar yang kondusif.
6	Pemberian Beasiswa Pendidikan	Membuat program beasiswa khusus untuk pendidikan di Papua, tidak hanya untuk perguruan tinggi tetapi juga untuk sekolah dasar dan menengah, guna meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Papua.

Agenda kebijakan yang dirumuskan untuk mendukung tujuan dan sasaran kebijakan pendidikan di Papua mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan upaya yang signifikan dalam meningkatkan akses pendidikan dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah dan jalan menuju daerah terpencil. Kedua, keamanan sekolah perlu diperhatikan

dengan serius untuk mengatasi konflik yang mengganggu proses belajar-mengajar.

Selain itu, evaluasi dan revisi kebijakan pendidikan yang sudah ada perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan kondisi lokal Papua dan efektif dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan. Penyediaan guru yang berkualitas juga menjadi fokus dengan program peningkatan jumlah dan kualitas guru, baik dari pendidikan guru lokal maupun dengan menarik guru dari luar Papua melalui insentif yang menarik.

Pengembangan sekolah asrama juga menjadi strategi penting untuk memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat di daerah terpencil dan meningkatkan mutu pendidikan dengan lingkungan belajar yang kondusif. Terakhir, pemberian beasiswa pendidikan merupakan langkah nyata dalam meningkatkan akses pendidikan di Papua, yang tidak hanya ditujukan untuk perguruan tinggi tetapi juga untuk sekolah dasar dan menengah. Dengan demikian, formulasi agenda kebijakan ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan pendidikan yang kompleks di Papua dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

3.2 Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan di Papua

Implementasi kebijakan adalah tahap dalam siklus kebijakan publik di mana keputusan atau rencana yang telah dibuat mulai diterapkan dalam bentuk tindakan nyata. Ini mencakup serangkaian langkah konkret untuk menerjemahkan kebijakan menjadi program, kegiatan, atau layanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Implementasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum, serta melibatkan alokasi sumber daya dan pengaturan proses yang efisien. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari kebijakan tersebut dan mengubah kebijakan menjadi realitas yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan yang dapat dirumuskan berdasarkan sasaran serta agenda yang telah disusun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Sasaran Kebijakan	Tahapan Implementasi
1	Meningkatkan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi daerah terpencil yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik. 2. Bangun dan perbaiki infrastruktur transportasi menuju daerah-daerah terpencil. 3. Bangun sekolah baru atau tambahan kelas di daerah terpencil. 4. Sediakan transportasi sekolah bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil.
2	Meningkatkan Keamanan Lingkungan Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kerjasama dengan pihak keamanan untuk memastikan keamanan di sekitar sekolah. 2. Berikan pelatihan keamanan kepada guru dan staf sekolah.
3	Menyesuaikan Kebijakan Pendidikan dengan Kondisi Lokal Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan studi komprehensif tentang kondisi lokal Papua untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan. 2. Libatkan masyarakat Papua dalam perumusan kebijakan pendidikan. 3. Evaluasi dan revisi kebijakan yang sudah ada yang belum sesuai dengan kondisi lokal.
4	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Pendidik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan program rekrutmen khusus untuk menarik calon guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. 2. Sediakan insentif finansial dan tunjangan khusus bagi guru yang bekerja di daerah terpencil. 3. Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan guru yang siap terjun ke lapangan.
5	Meningkatkan Infrastruktur Pendidikan di Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangun dan perbaiki fasilitas pendidikan seperti sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. 2. Pastikan aksesibilitas ke infrastruktur pendidikan dengan memperbaiki jalan dan transportasi umum. 3. Tingkatkan akses internet dan teknologi pendidikan di sekolah.
6	Memperbaiki Tata Kelola Pendidikan di Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS dan rekrutmen guru PNS. 2. Bentuk forum yang memfasilitasi komunikasi antara guru, kepala sekolah, dan orang tua. 3. Tingkatkan sistem pengendalian manajemen pendidikan dengan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sekolah yang lebih baik.

Implementasi kebijakan pendidikan di Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Langkah-langkah implementasi harus memperhatikan kondisi geografis, sosial, dan

budaya Papua yang unik.

Pertama, untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai. Ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya agar siswa dan tenaga pendidik dapat mencapai sekolah dengan lebih mudah. Selain itu, pembangunan sekolah baru atau tambahan kelas di daerah terpencil juga perlu dilakukan untuk memastikan semua anak dapat mengakses pendidikan.

Kedua, dalam hal meningkatkan keamanan lingkungan belajar, kerjasama antara pemerintah, pihak keamanan, sekolah, dan masyarakat setempat sangat penting. Pelatihan keamanan bagi guru dan staf sekolah, dan peningkatan patroli keamanan di sekitar sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

Ketiga, menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi lokal Papua membutuhkan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Studi komprehensif tentang kebutuhan dan keunikan setiap daerah di Papua harus dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang relevan dan efektif. Dalam hal ini, keterlibatan tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan pendidik lokal sangat penting.

Keempat, untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik, program rekrutmen khusus dan insentif bagi guru yang bekerja di daerah terpencil perlu ditingkatkan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga perlu diperkuat untuk menghasilkan lulusan guru yang siap terjun ke lapangan. Peningkatan kualifikasi guru yang sudah ada juga harus menjadi prioritas.

Kelima, untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di Papua. Hal ini mencakup bangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang memadai. Pastikan juga aksesibilitas infrastruktur pendidikan dengan memperbaiki jalan dan transportasi umum.

Keenam, untuk memperbaiki tata kelola pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS serta rekrutmen guru PNS. Bentuk forum yang memfasilitasi komunikasi antara



guru, kepala sekolah, dan orang tua juga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan terencana, diharapkan pendidikan di Papua dapat mengalami perbaikan yang signifikan..

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pemecahamn masalah yang telah dibahas sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Masalah pendidikan di Papua merupakan hasil dari berbagai faktor kompleks yang meliputi kondisi geografis yang sulit, konflik yang sering terjadi, kebijakan yang belum optimal, terbatasnya jumlah dan kualitas guru, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, dan tata kelola pendidikan yang lemah. Semua faktor ini secara bersama-sama menyebabkan akses pendidikan yang terbatas, lingkungan belajar yang tidak aman, kebijakan yang kurang mendukung, kurangnya tenaga pendidik berkualitas, infrastruktur pendidikan yang minim, dan tata kelola pendidikan yang tidak efektif. Diperlukan upaya terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan mutu pendidikan di Papua.
2. Ada dua program kebijakan yang sudah dilaksanakan di Papua, yaitu program pembangunan sekolah asrama dan program beasiswa. Program pembangunan sekolah asrama dan pemberian beasiswa merupakan langkah yang positif dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Papua. Sekolah asrama dapat membantu menyediakan pendidikan yang lebih merata di daerah terpencil, sementara beasiswa dapat mendorong partisipasi dan prestasi siswa. Namun, evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program-program ini. Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap sejauh mana program-program ini telah mencapai tujuan mereka dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan, serta analisis terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan evaluasi yang baik, program-program ini dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk memberikan dampak yang lebih positif bagi pendidikan di Papua.
3. Situasi ekonomi, sosial, dan politik Papua memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan di wilayah tersebut. Ketidaksetaraan ekonomi dan

keterbatasan akses infrastruktur sosial seperti layanan kesehatan dan transportasi memperumit upaya untuk menyediakan pendidikan berkualitas di daerah terpencil. Konflik politik dan ketidakstabilan keamanan sering mengganggu proses belajar-mengajar, sementara ketidakpastian politik juga dapat menghambat perencanaan jangka panjang dalam pengembangan sistem pendidikan. Selain itu, faktor sosial seperti budaya dan bahasa yang beragam juga memengaruhi dinamika pendidikan, memerlukan pendekatan yang sensitif dan inklusif dalam merancang kebijakan dan program pendidikan. Dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, upaya untuk meningkatkan pendidikan di Papua dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Kebijakan yang telah diformulasikan dalam tabel sebelumnya mencakup berbagai aspek penting dalam upaya meningkatkan pendidikan di Papua. Dari peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil hingga peningkatan infrastruktur pendidikan, kebijakan ini dirancang untuk mengatasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Papua. Selain itu, kebijakan juga menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kondisi lokal Papua, meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik, serta memperbaiki tata kelola pendidikan. Dengan implementasi yang tepat, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan di Papua.

4.2 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan yang dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua untuk meningkatkan kualitas mutu dan akses pendidikan di Papua secara menyeluruh adalah :

1. Mendirikan Sekolah-sekolah berpola asrama dan dukungan bea siswa. Ditematkannya Murid, guru dan sekolah dalam 1 (satu) lokasi yang berdekatan diharapkan dapat mengikis kendala kondisi geografis yang ada dan biaya transportasi pun menjadi lebih murah;

- 
2. Melakukan kerja sama dengan pihak keamanan TNI-Polri untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa dan guru, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Khususnya di daerah pedalaman, Pos-pos keamanan sebaiknya ditempatkan tidak jauh dari lokasi sekolah-sekolah dan patroli rutin perlu dilakukan demi terciptanya kondisi yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. *Papua Dalam Angka 2023*. Papua: BPS.
- Gtk, S. (n.d.). *Antusiasme Pendidikan di Tengah Terjalnya Geografis Papua*.
<https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/antusiasme-pendidikan-di-tengah-terjalnya-geografis-papua>
- Kemdikbud. (2019). *Pendidikan merata dan berkualitas untuk Papua*.
<https://pskp.kemdikbud.go.id/>.
https://pskp.kemdikbud.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/kebijakan/2018_Akses_Mutu_Pendidikan_Papua.pdf
- Kogoya, A., Waani, F. J., & Paat, C. J. (2023, August 14). *Dampak Pendidikan terhadap Kualitas anak-anak Pedalaman di Kampung Mundidok Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak Provinsi Papua*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/50407>
- Purwoko, B., Lele, G., Ruhyanto, A., Indonesia, A., Nugroho, I., Alqorina, F., & Aryantari, I. (2023). *Tindak kekerasan di Papua*. Yogyakarta: UGM.